

*PROPOSAL RISET*

*2021*



*Dampak Pandemi Covid-19  
terhadap Tingkat Kemiskinan  
di Kabupaten Ogan Komering Ilir*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penelitian ini adalah terkait dengan dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2020, pandemi virus corona (Covid-19) menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II minus 5,32%. Dari sektor ketenagakerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) (Waseso, 2020)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan Indonesia menyentuh angka 10,19 persen pada September 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi lantaran pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan (kompas.com, 2021). Bank Dunia juga menyebut pandemi memicu beragam konflik, termasuk yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Dampak pandemi itu mereka sebut memperlambat upaya mengurangi kemiskinan.

Dampak pandemi dirasakan tidak hanya di dunia. Di Indonesia, Kabupaten OKI juga turut terdampak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS OKI pada Maret 2020, misalnya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.081,58 ribu orang atau 12,66 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan kondisi September 2019 jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 14,42 ribu orang dari 1.067,16 ribu orang, atau naik 0,10 persen poin dari 12,56 persen. Dibandingkan keadaan Maret 2019, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 7,84 ribu dari 1.073,74 ribu orang, tetapi persentasenya turun sebesar 0,05 persen poin dari 12,71 persen.

Untuk menghadapi pandemi covid-19, pemerintah OKI sudah melakukan berbagai upaya. Pemerintah berupaya mempercepat pengalihan dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengalihan dana desa tersebut sesuai dengan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sebanyak 25% hingga 35% dana desa dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa penanganan bencana covid-19. BLT dana desa diberikan kepada warga miskin atau ekonomi lemah di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah. Misalnya Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai dan kartu prakerja. BLT dana desa diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Sehingga total yang akan diberikan selama tiga bulan tersebut ialah Rp1,8 juta (Apriani, 2020).

Akibat pandemi covid-19, diperkirakan kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat. Untuk itu, perlu kebijakan penanggulangan masyarakat dari kemiskinan yang tepat. Persebaran Covid-19 yang saat ini terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan. Hal yang perlu diwaspadai selanjutnya yakni potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, di antaranya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa. Kebijakan yang dibuat pun harus menekankan pentingnya meletakkan prioritas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan menganalisis dampak kemiskinan yang diakibatkan dari pandemi covid-19. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis terkait faktor apa saja yang menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang mengalami kemiskinan. Hal ini penting, pasalnya, pandemi menimbulkan rasa khawatir bagi pemerintah dan masyarakat. Karena dampak pandemi yang terjadi tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat kesehatan saja, namun menyerang perekonomian serta sosial masyarakat. Sehingga, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan pengawasan serta membuat strategi untuk dapat menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dari adanya pandemi covid-19.

Selain itu, penelitian ini akan menganalisis target kemiskinan dan TPT Sumatera Selatan terkait dengan Kabupaten OKI yang diakibatkan dari dampak Pandemi Covid-19. Penelitian juga akan melihat kesepakatan yang dibangun dalam target kemiskinan dan TPT, serta mengkaji langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi masyarakat dari kemiskinan secara komprehensif. Pasalnya, dampak pandemi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terus melambat, meningkatkan pengangguran, meningkatkan

kriminalitas, rawan pangan, penurunan kontribusi pariwisata, dan penurunan infrastruktur akan terhambat. Di tingkat nasional, berdasarkan skenario berat potensi dampak kemiskinan Sumatera Selatan akan meningkat 1,16 % . Begitu juga dengan pengangguran yang meningkat 2,92 % . Begitu juga dengan TPT Sumsel. Pada 2019 4,48 % lebih rendah dibanding Nasional 5,28 % .

Adapun, fokus penelitian ini yaitu berfokus pada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). OKI merupakan salah satu wilayah dengan kontur perdesaan. Wilayah Oki juga merupakan daerah dengan mobilitas orang desa ke kota atau sebaliknya cukup tinggi. Sehingga dengan beberapa kasus yang terjadi menyebabkan penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah. Selain itu, Kabupaten OKI juga menjadi daerah terdampak. Pemerintah OKI dalam beberapa kesempatan cukup sibuk membuat kebijakan dan strategi. Misalnya beberapa waktu lalu, Pemkab OKI menyiapkan dana dari refocussing senilai Rp345 miliar untuk tahap kedua dari sebelumnya Rp92 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten OKI senilai Rp325 miliar, BTT Rp 1,8 miliar, dan dana desa senilai Rp58,10 miliar. Kabupaten OKI juga membutuhkan dukungan kontribusi dari pemerintah pusat. Untuk itulah penelitian dampak pandemic covid 19 sangat penting dilakukan.

Terdapat beberapa hasil penelitian terkait dengan dampak covid-19 yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Rizal (2021). Penelitian ini berkesimpulan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut adalah dengan *social* atau *physical distancing*. Akan tetapi hal tersebut berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. *Physical distancing* yang berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan penurunan *agregat supply* dan *agregat demand* dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah penawaran dan permintaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kasna (2021) yang berfokus pada dampak pengangguran kemiskinan dan konsep teoritis pandemi covid-19. Penelitiannya membahas program pemerintah dalam penanggulangan masyarakat miskin. Terdapat empat program di antaranya; padat karya produktif, memperluas perkebunan melalui pelatihan terpadu, usaha mandiri, dan TKPMP (Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional). Namun program-program tersebut belum diimplementasikan secara komprehensif, sehingga masing-masing program terkesan parsial, tidak terkait satu sama

lain apalagi dengan program-program departemen lain. Permasalahan tersebut juga membawa pengaruh negatif. Seperti semakin longgarnya ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai, serta hubungan antar manusia. Selain itu menurutnya pencegahan penanggulangan pandemi covid-19 lebih menggunakan nilai modern dengan memarginalkan nilai transcendental. Akibatnya terjadi dampak yang berkepanjangan berbagai bentuk penyimpangan nilai moral yang tercermin dalam corak, gaya dan pola hidup masyarakat dari kemiskinan akibat dampak pandemi covid-19.

Penelitian terkait dengan dampak covid-19 juga dilakukan oleh Yamali & Putri, (2020) yang berfokus pada dampak covid-19 terhadap ekonomi Indonesia. Penelitian ini menunjukkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 secara tidak langsung dapat menimbulkan pemerosotan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi akibat pandemi covid-19 di Indonesia antara lain terjadinya PHK, terjadinya PMI *Manufacturing* Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi. Akibat dari hal ini diharapkan pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam menangani penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan dari pandemi covid-19.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yamali yang berfokus pada dampak covid-19 terhadap ekonomi Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sugiri, (2020) membahas penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari dampak pandemi covid-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Tujuannya adalah memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM tersebut serta memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan, sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa keberhasilan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19 perlu didukung dengan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan UMKM sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia.

Kemudian terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Consuello, (2020) yang meneliti tentang analisis efektivitas kartu pra-kerja di tengah pandemi covid-19. Di mana, pengangguran merupakan masalah serius yang sampai saat ini belum bisa di atasi oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana adik kandung antara pengangguran dan kemiskinan

keduanya tidak dapat terpisahkan. Karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Adapula penelitian yang berfokus pada dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia yang dilakukan oleh Nurwati (2020). Di mana, Kepanikan di kalangan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar. Jika pandemi ini terus meningkat maka banyak orang yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka. Pengangguran di Indonesia yang menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Oleh karna itu peran, upaya dan kebijakan dari pemerintah lah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan saat ini adalah dengan memberikan berbagai macam bantuan sosial dengan harapan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun ada pembatasan yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sehari hari seperti biasanya. Masyarakat Indonesia diminta untuk mengikuti segala arahan pemerintah dengan harapan memulihkan kembali keadaan seperti sedia kala.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Thaariq et al., (2020) berfokus pada Kemiskinan Multidimensi dan Risiko COVID-19 di Indonesia. Di mana penelitian menganalisis kerentanan penduduk Indonesia terhadap dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini melakukan simulasi menggunakan model SEIR untuk memperkirakan jumlah orang terdampak dari setiap kelompok risiko apabila terdapat kebijakan pembatasan sosial. Penelitiannya menggunakan beberapa skenario simulasi untuk memperkirakan dampak pandemi Covid-19 secara lebih beragam. Penelitiannya menemukan, bahwa kebijakan pembatasan sosial yang efektif mampu menurunkan jumlah penduduk terdampak secara signifikan. Dalam simulasi di kelompok miskin multidimensi berisiko, apabila tidak ada kebijakan pembatasan sosial, maka orang di kelompok tersebut yang dapat terinfeksi Covid-19 mencapai 1,13 juta orang. Akan tetapi, apabila terdapat kebijakan pembatasan sosial maka jumlah orang yang terinfeksi di kelompok ini bisa dikurangi hingga mencapai 27.348 orang pada efektivitas kebijakan yang sangat pelan dan dapat ditekan hingga mencapai 830 orang pada efektivitas kebijakan pembatasan sosial terbaik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Anisa, 2020) yang berfokus pada korelasi kemiskinan dan kejahatan. Di mana, ada banyak penyebab dari tindak kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya yaitu watak yang menjadi bawaan lahir, rasa ingin diakui, gangguan psikologi, kemiskinan, dll. Hasil penelitiannya menemukan, banyak para pelaku tindak kejahatan mengatasnamakan kemiskinan sebagai tameng dalam melakukan tindak kejahatan.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini akan dibahas secara terfokus terkait dengan dampak covid-19 yang dirasakan langsung oleh penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana, penelitian ini menarik untuk diteliti karena semenjak covid-19 Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang terdampak dengan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, kita dapat mengetahui apa saja sektor yang terdampak dan bagaimana prosesnya sehingga dapat menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang mengalami kemiskinan sejak adanya pandemi covid-19. Dengan begitu, kita dapat mengetahui dampak yang terjadi karena maraknya kasus covid-19 serta mempelajari bagaimana upaya masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir menghadapi situasi tersebut.

Berikut ini adalah tabel terkait dengan Rasio Gini Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2018-2020:

Tabel 1. Rasio Gini Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2018-2020

<b>Rasio Gini Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten Ogan Komering Ilir</b>		
<b>2018</b>	2019	2020
<b>0,330</b>	0,280	0,302

Sumber : BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2021

Penelitian ini dianggap relevan karena sesuai dengan fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terletak pada Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera (Kompas, 2021). Pandemi Covid-19 tidak hanya memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya semata, tetapi juga berpengaruh hingga ke kedaulatan pangan, kerawanan pangan adalah ancaman paling nyata. Hal ini sejalan dengan tabel di atas yang menunjukkan bahwa Rasio gini pada Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun

2018 berada di angka 0,330 dan turun pada tahun 2019 yaitu berada di angka 0,280. Namun, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,302 yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor penyebabnya yaitu karena adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas topik terkait dengan “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

## **1.2. Permasalahan**

Uraian di atas kiranya perlu mendapat perhatian. Pemerintah perlu memastikan dampak pandemic terhadap kemiskinan di daerah. Ini penting agar penanganan pandemi covid-19 dapat terukur dan tepat sasaran. Atas dasar itulah, setidaknya penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan, di antaranya:

1. Bagaimana tekanan kemiskinan dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat miskin akibat pandemi covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melangsungkan kehidupan sosial dan pengembangan usahanya?
2. Bagaimana gambaran mekanisme survival yang dikembangkan keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyasati tekanan krisis dan ancaman kemiskinan dalam masa pandemi covid-19?
3. Apa saja sebetulnya yang menjadi kebutuhan masyarakat miskin di Ogan Komering Ilir untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya dalam masa pandemi covid-19?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam masa pandemi covid-19?

## **1.3. Tujuan**

Secara garis besar, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memebri gambaran tekanan kemiskinan dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat miskin akibat pandemi covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melangsungkan kehidupan sosial dan pengembangan usahanya.

2. Mengidentifikasi gambaran mekanisme survival yang dikembangkan keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyasati tekanan krisis dan ancaman kemiskinan dalam masa pandemi covid-19.
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin di Ogan Komering Ilir untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya dalam masa pandemi covid-19.
4. Merumuskan Faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam masa pandemi covid-19.

#### **1.4. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Teridentifikasinya gambaran bentuk tekanan kemiskinan dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat miskin akibat pandemi covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melangsungkan kehidupan sosial dan pengembangan usahanya.
2. Teridentifikasinya gambaran mekanisme survival yang dikembangkan keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyasati tekanan krisis dan ancaman kemiskinan dalam masa pandemi covid-19.
3. Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat miskin di Ogan Komering Ilir untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya dalam masa pandemi covid-19.
4. Terumuskannya Faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam masa pandemi covid-19.

#### **1.5. Jadwal Kegiatan**

Menurut rencana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan ini adalah 1 bulan sejak kontrak ditandatangani, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan ke			
	1	2	3	4
Persiapan, pra-survey dan pengurusan ijin	X			
Penyusunan instrument	X			
Pengumpulan data primer	XX	XX		
Pengumpulan data sekunder	X	XX		
Editing data dan tabulasi		XX	X	
Pengolahan dan analisis data			XX	
Penulisan draft laporan			XX	
Perumusan strategi dan program			XX	XX
Seminar dan perbaikan laporan akhir				X
Penggandaan laporan				X

Keluaran kajian ini adalah laporan hasil kajian produk unggulan berkualitas sebagai bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah serta *policy brief* kepada Bupati Ogan Komering Ilir terkait perumusan kebijakan Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Kerangka Teori**

Selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan studi dan kajian tentang kemiskinan, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan dan apa pula faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas umumnya masih simpang-siur. Antara ahli yang satu dengan ahli yang lain telah melukiskan masalah ini secara berbeda-beda. Levitan (1980) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidakanggapan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan, dengan nada yang sama Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ala, 1981: 1-3).

Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Studi yang dilakukan Wignjosoebroto dkk., (1992) tentang kehidupan masyarakat rentan di Kota Surabaya menemukan bahwa seseorang atau sebuah keluarga yang dijejas kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk

mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, sedangkan untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada taraf yang subsisten saja bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya.

Definisi yang lebih lengkap tentang kemiskinan dikemukakan oleh John Friedman. Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi. Pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

## **2.2. Kemiskinan Absolut dan Relatif**

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Menurut kriteria Bank Dunia, (1) jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 % dari pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan nasional yang Santa timpang; (2) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 % dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang; dan (3) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 % dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.

Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti : sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi nyata tersebut dinyatakan secara kuantitatif dan atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu. Kemudian, karena biaya hidup di daerah kota dan di daerah desa berbeda, demikian juga antara kelompok masyarakat di dalamnya, maka oleh Bank Dunia

dipakai sebagai ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan adalah nilai US \$ 50 per kapita per tahun untuk tingkat pendapatan di desa dan US \$ 75 per kapita per tahun untuk tingkat pendapatan di kota pada keadaan tingkat harga tahun 1971.

Di samping itu, ada juga pengertian kemiskinan lain yang dikembangkan oleh Sajogyo. Dikatakan bahwa, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standart kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Pada tahun 1973, WHO/FAO merekomendasi tentang jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia yang besarnya masing-masing 1.900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Dan, berdasarkan ukuran tersebut, Sajogyo telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut :

1. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya.
2. Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram per tahunnya.

Ada lagi ukuran khas tentang kemiskinan yang dipakai di Indonesia. Untuk mengatur ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat umum, termasuk golongan yang tidak kaya, maka pemerintah Republik Indonesia sejak lama telah menentukan sembilan bahan pokok hidup yang senantiasa dijaga jangan sampai harganya membung tinggi hingga tidak terbeli oleh sebagian besar dari rakyat, pun supaya jumlahnya di pasar bebas cukup banyak. Sembilan bahan pokok itu adalah : beras, gula, minyak goreng, minyak tanah, dan sebagainya yang selalu diperlukan dalam tiap-tiap rumah tangga para penduduk kampung atau desa. Apabila ada rumah tangga tertentu yang terus-menerus tidak mampu mencukupi keperluan bahan-bahan pokok hidup itu menurut ukuran tertentu, maka rumah tangga itu dapat dianggap miskin.

### **2.3. Ciri-ciri Kemiskinan**

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut

garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu :

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti : tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh assets produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena harus membantu orang tuanya nafkah tambahan.
4. Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian.. tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (self employed) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.
5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusaha muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa itu. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai

urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara sedang berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

#### **2.4. Tiga Masalah**

Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, pada dasarnya bisa dikategorikan dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) kelompok filantropis; (2) kelompok reformis; dan (3) kelompok revolusioner.

Pertama, kelompok filantropis. Kelompok ini tidak memandang masalah kemiskinan material dan kultural rakyat dalam kaitannya dengan kelembagaan dan struktur basisnya. Mereka berkeyakinan bahwa adalah mungkin untuk meningkatkan keadaan rakyat miskin melalui upaya kemanusiaan secara langsung, tanpa mengubah lembaga dan struktur yang ada.

Program-program ekonomis dan pendidikan disusun dan dikembangkan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, dengan cara-cara seperti pengumpulan dana-dana yang sifatnya karitatif untuk menolong penduduk yang membutuhkannya, ajakan-ajakan moral yang ditujukan kepada tuan-tuan tanah dan kelompok-kelompok lainnya untuk mengurangi tekanan-tekanan terhadap para petani, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lainya.

Ciri utama pandangan dan pendekatan programatik kelompok ini terhadap permasalahan terletak pada kenyataan bahwa mereka mencoba memperbaiki kehidupan rakyat miskin dalam kerangka lembaga-lembaga dan struktur yang telah ada, dengan cara-cara yang sepenuhnya didorong oleh pertimbangan kemanusiaan.

Kedua, kelompok reformis. Menurut kelompok ini, kesalahan berfungsinya sistem kemasyarakatan dan lembaga-lembaganya (dan bukan kesalahan asas sistem sosial dan kelembagaan itu sendiri) yang menjadi sebab-sebab sosial genetis dari kemalangan ekonomi, keterbelakangan sosial dan kultur rakyat. Oleh karena itu, mereka bekerja keras bagi berfungsinya sistem sosial dan kelembagaan yang ada secara sehat, atau paling jauh

memperbaruinya. Ditekankan bahwa sekali reformasi institusional ini dapat diselesaikan akan dapat dihasilkan perbaikan di seluruh bidang kehidupan rakyat miskin.

Ciri utama untuk mengenal pandangan dan pendekatan programatik kelompok ini pada suatu permasalahan terletak pada kenyataan bahwa untuk meningkatkan kehidupan rakyat, mereka tidak menganggap perlu menggantikan sistem sosial yang ada berikutan kelembagaannya dengan sesuatu yang baru, melainkan cukup dengan memperbaikinya saja.

Ketiga, kelompok revolusioner. Titik tolak pandangan dan pendekatan programatik dari kelompok ini didasarkan pada suatu konsep revolusioner. Kemiskinan yang mendera, kebodohan yang luar biasa dan keterbelakangan budaya rakyat secara fundamental adalah disebabkan oleh sistem sosial yang ada dan kelembagaannya, yang menurut mereka tidak dapat melahirkan yang lain selain keadaan yang menyedihkan tersebut.

Karenanya, penyakit yang diderita rakyat miskin bukan akibat kurang berfungsinya suatu sistem sosial dan kelembagaannya, tapi memang 'inherent' ada dalam sistem sosial dan kelembagaan itu sendiri. Dalam anggapan dasar yang demikian, kelompok ini lalu mencoba dan mengembangkan suatu program transformasi atas sistem sosial dan basis ekonominya ke atas. Menurut kelompok ini, segala bentuk bantuan individual atau sumbangan kemanusiaan serta reformasi institusional tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

## **2.5 Akar Penyebab Kemiskinan**

Menurut faktor yang melatarbelakanginya, akar penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patron-client, jiwa gotong-royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredakan kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan —dalam banyak hal— terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial acapkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai

kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut *unskilled labour*. Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah —yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah (Soedjatmoko, 1981: 46- 61). Di kota seperti Surabaya, golongan masyarakat miskin ini umumnya tinggal di rumah-rumah petak atau permukiman kumuh yang padat, berjejal, dan sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal.

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya —kalaupun terjadi sifatnya lamban sekali— apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Mengapa bisa sampai begitu? Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada kungkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan. Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial- ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ud (1994: 143), adanya ketergantungan inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk bargaining dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual —pendek kata pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Pengertian dan definisi kemiskinan struktural, kendati menjadi alternatif konsep yang lebih disukai ilmuwan sosial. tetapi, kelebihan definisi seperti yang dikemukakan Selo Soemardjan di atas diakui atau tidak sesungguhnya cenderung bersifat ideologis — dalam arti definisi di atas populer karena di sana ada semangat dan nilai-nilai yang menggugat kemapanan dan status quo. Secara konseptual, definisi kemiskinan yang dikemukakan Selo Soemardjan sedikit-banyak bersifat normatif. Parsudi Suparlan, misalnya, seorang antropolog yang menyunting kumpulan tulisan tentang kemiskinan di perkotaan, dengan lugas menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan Selo Soemardjan kurang tajam dan tidak masuk akal (Suparlan, 1984: 14-15).

## **2.6. Perangkap Kemiskinan**

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap —dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas— dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurut Robert Chambers, inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, deprivation trap terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Dari kelima dimensi di atas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan, menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan poverty rackets atau "roda penggerak kemiskinan" yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus di mana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin di kesempatan yang lain mungkin dimanifestasikan dalam hal seringkali keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan sering pula

mengakibatkan terjadinya bias bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi (Loekman Soetrisno, dalam: Dewanta dkk., 1995: 19-20).

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin acapkali mampu tetap survive dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang atau keluarga yang jatuh pada lingkaran setan atau perangkap kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit perangkap kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan.

Secara empirik, banyak bukti memperlihatkan bahwa naiknya penduduk di atas garis kemiskinan tidak otomatis berarti penduduk tersebut hidupnya benar-benar bebas dari ancaman dan perangkap kemiskinan, melainkan penduduk tersebut sebenarnya hanya berpindah dari satu tahap kemiskinan yang terendah yaitu tahap destitute ke tahap apa yang disebut sebagai near poor. Dibandingkan dengan kelompok kemiskinan destitute, kelompok near poor hidupnya memang relatif lebih baik, namun belumbenar-benar stabil. Dalam arti bila sewaktu-waktu kelompok near poor ini menghadapi suatu krisis, maka dengan cepat kelompok near poor ini akan melorot lagi ke status destitute. Sebuah keluarga petani yang termasuk kelompok near poor tidak mustahil terpaksa turun kelas menjadi kelompok destitute bila tanpa diduga panen mereka tiba-tiba gagal karena serangan hama, karena serangan banjir, atau karena anjloknya harga jual di pasaran akibat ulah spekulasi gabah.

Dalam kenyataan bahkan acap terjadi, kelompok masyarakat yang termasuk cukupan atau kaya bukan kelompok near poor tiba-tiba harus mengalami penurunan status yang drastis, yakni masuk ke dalam kelompok "keluarga miskin baru". Jadi, berbeda dengan kesan dan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini yang menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa turun dari waktu ke waktu, dalam kenyataan justru tidak jarang terjadi penambahan jumlah orang miskin. Studi yang dilakukan Bagong Suyanto di sejumlah daerah di Jawa Timur menemukan bahwa kelompok masyarakat yang terpaksa turun statusnya dari kelompok cukupan menjadi "keluarga miskin baru" adalah kelompok petani cengkeh dan petani garam

(Suyanto, 1996). Studi yang dilakukan Bagong Suyanto tersebut, walau dengan jumlah sampel yang terbatas, namun membuktikan bahwa usaha untuk memberantas kemiskinan memang bukan hal yang mudah, sebab apa yang dialami keluarga dan masyarakat miskin bukan sekedar kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya modal usaha saja, tetapi lebih dari itu yang sesungguhnya membelenggu keluarga dan masyarakat miskin adalah apa yang disebut Robert Chambers dengan istilah perangkap kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan.

## **2.7. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, PDM-DKE, program Takesra-Kukesra, JPS, PPK, dan lain-lain membangun infrastruktur di permukiman umuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain. Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar.

Menurut Ginandjar Kartasmita (1995), pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari.

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk

memberdayakan dirinya. Acap terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Dalam konteks ini, sebagai sebuah prakarsa baru, Program GERDU TASKIN sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Sebab, sejak awal disadari bahwa tujuan program ini adalah memandirikan dan memberdayakan komunitas di tingkat lokal untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan menurut kemampuan dan inisiatif mereka sendiri secara terpadu.

Namun demikian, selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan baik di tingkat nasional, regional maupun lokal umumnya adalah dengan menerapkan pendekatan ekonomi semata, yang seringkali kurang mengabaikan peran kebudayaan dan konteks lokal masyarakat. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya (Karnaji dkk., 2000). Kendati secara harafiah nama berbagai program pengentasan kemiskinan dan program JPS berbeda-beda, tetapi substansinya sesungguhnya hampir sama, yakni memberikan aliran modal kepada masyarakat miskin dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk memberdayakan dirinya sendiri. Memang, untuk jangka pendek pemberian bantuan ekonomi itu bisa bermanfaat. Tetapi, untuk jangka panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pemberian bantuan ekonomi saja ternyata justru melahirkan problem-problem baru yang tidak kalah ruwetnya. Bahkan, tidak mustahil terjadi diperolehnya bantuan modal pinjaman kredit justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha masyarakat miskin (Mubyarto, 1985: 429). Sebabnya salah satunya adalah berpangkal dari kesalahan orang miskin itu sendiri yang kadang hidup boros. Tetapi, disisi lain, kesalahan juga bisa bersumber dari tekanan- tekanan kebutuhan ekonomi yang memang tidak bisa dielakkan masyarakat miskin, sering menyebabkan mereka terpaksa harus mengalihkan dan memanfaatkan kredit yang diperoleh bukan untuk kegiatan produktif, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif (Chambers, 1987).

Penelitian yang dilakukan Bagong Suyanto (1991-1995) tentang peran berbagai lembaga kredit pedesaan —seperti Perum Pegadaian, BPR, lembaga KURK, Kredit Usaha Tani, dan sebagainya— yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kegiatan produktif masyarakat, menemukan ternyata banyak nasabah yang memanfaatkan kredit yang diperolehnya itu bukan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, terutama untuk makan sehari-hari. Tekanan kebutuhan sehari-hari yang senantiasa mengancam dan kewajiban untuk menghidupi anak dan semacamnya telah membuat banyak keluarga atau golongan masyarakat miskin sulit untuk mengembangkan usahanya.

Sementara itu, studi yang dilakukan Bagong Suyanto dan Karnaji dkk. (2000) dalam batas-batas tertentu menemukan bahwa implementasi Program GERDU TASKIN di lapangan ternyata tidak selalu seperti yang diharapkan. Belum jelasnya siapa sebenarnya kelompok sasaran yang diprioritaskan, dan masih adanya ego sektoral di masing-masing departemen, serta ditambah lagi dengan orientasi program yang belum bersifat kontekstual, maka bisa dipahami jika pelaksanaan berbagai program penghapusan kemiskinan belum memperlihatkan hasil dan daya ungkit yang memadai. Bahkan, dalam beberapa hal, pelaksanaan program GERDU TASKIN yang semula diharapkan dapat memberdayakan penduduk miskin, ternyata dalam kenyataan justru melahirkan bentuk ketergantungan baru dan berbagai penyimpangan yang menyebabkan pada akhirnya Program GERDU TASKIN menjadi tidak efektif. Kekurangan lain, dari berbagai program GERDU TASKIN adalah pada segi proses dan transparansinya. Ada kesan kuat, akibat kurangnya proses persiapan, khususnya program-program JPS, menyebabkan tahap penting dalam program GERDU TASKIN seperti keharusan untuk melakukan sosialisasi program menjadi kurang matang, dan pada akhirnya menyebabkan keterlibatan masyarakat untuk dapat ikut melakukan kontrol sosial menjadi lemah. Meski sulit untuk dikuantifisir, tetapi dalam banyak kasus acapkali ditemukan bahwa pelaksanaan program- program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan rawan bias, dan bahkan rawan penyimpangan —termasuk rawan kebocoran.

## **2.8. Learning From The People**

Untuk menghindari syakwasangka dan untuk memahami apa sebenarnya kebutuhan keluarga miskin, ada sejumlah petunjuk yang ditawarkan para ahli. Chambers (1983),

misalnya, menyatakan ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi meruyaknya syakwasangka dan persepsi yang salah tentang keluarga miskin, yakni (1) menghilangkan sikap anti golongan miskin, (2) tinggal lebih lama dan pergi lebih jauh ke berbagai pelosok desa, dan (3) berlaku seperti orang atau rakyat kecil dan mau belajar dari mereka (learning from the people) --bukan learning about the people.

Kecenderungan untuk mengunjungi desa sepanjang jalan aspal yang hanya dapat dijangkau oleh kendaraan dapat dilawan dengan berjalan kaki lebih jauh dan keluar dari jalan raya atau jalan aspal. Kecenderungan untuk hanya memusatkan perhatian kepada daerah proyek dapat diimbangi dengan kunjungan ke daerah lain yang di luar proyek atau dengan kunjungan yang tak dijadwalkan dan dilakukan secara sederhana untuk menghindari kesan yang menyesatkan.

Kecenderungan untuk menghubungi orang-orang tertentu, dapat diimbangi dengan kunjungan kepada keluarga miskin, sengaja menemui kaum wanita, menjenguk orang-orang yang sakit di rumahnya sendiri (bukan di klinik). Kecenderungan untuk melakukan kunjungan pada musim kemarau dapat dialihkan dengan kunjungan ke desa pada bulan-bulan penghujan atau setidak-tidaknya bertanya tentang keadaan mereka yang memburuk pada waktu itu.

Sementara itu, kecenderungan untuk bersikap sopan-santun dapat diubah dengan cara menjelaskan apa yang diinginkan, dan prasangka serta sikap keangkuhan yang biasa ada di lingkungan kaum profesional dapat diperbaiki dengan mencoba melakukan introspeksi untuk melihat keterbatasan diri sendiri dan selalu bertanya secara terbuka.

Pendek kata, agar para perencana pembangunan tidak memperoleh jawaban-jawaban semu dan kesan-kesan yang menyesatkan tentang kemiskinan -- menurut Chambers-- selain perlu kewaspadaan dan kecermatan, tidak bisa tidak kita harus bersedia mengubah cara pandang yang semula aristokratis ke model cara pandang yang berorientasi pada kerakyatan. Dengan menerapkan pendekatan learning from the people, akan mendorong dan memungkinkan orang untuk belajar dari bawah --yang di dalamnya mengandung proses saling belajar dan mendorong hubungan yang sederajat antara pencari dan pemberi informasi, yakni suatu sikap yang oleh Peter L. Berger (1977) disebut "penghormatan kognitif" dari orang yang berpendidikan dan berpengaruh kepada orang yang kurang berpendidikan dan tidak berpengaruh.

Satu contoh yang menarik: di Yogyakarta, Paulus Santosa dari rumah sakit Bethesda melatih para petugas gizi dengan menyuruh mereka belajar dari orang yang paling miskin --bukan dengan cara bersikap sok tahu dan berusaha mendidik cara hidup sehat menurut kacamata medis. Dengan kata lain, para peserta latihan gizi bukan diminta merumuskan strategi dan petunjuk cara hidup sehat menurut versi mereka atau menurut kelayakan medis, tetapi mereka justru diharuskan belajar dari keluarga miskin yang anak-anaknya sehat dan berat badannya normal.

## **2.9. Dampak Covid Terhadap Perekonomian di Indonesia**

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat dunia termasuk Indonesia, namun juga memberikan dampak lain yang tentunya memicu kekhawatiran pemerintah beserta masyarakat karena terjadi berbagai perubahan pada berbagai sektor termasuk ekonomi. Dampak yang dialami sektor ekonomi saat ini yaitu pertama, untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, lebih dari 1,5 juta.”. Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena-PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal. Selanjutnya dampak kedua, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 49. Adapun PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan. Ketiga, impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen year-to-date (ytd). Keempat, Inflasi/peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai 2,96 persen year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Kelima, 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Keenam, kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina. Ketujuh, angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina. Kedelapan, penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu. (Hanoatubun, 2020)

## 2.10. Psikologi Pandemi Covid-19

Pandemi psikologi lebih diartikan bagaimana penyakit—yang menyebar secara cepat dan luas memberikan dampak psikologis yang signifikan pada manusia. Ada tiga elemen dalam pandemi, yaitu elemen yang menyebabkan infeksi (virus, bakteri), host (manusia) yang berkaitan dengan faktor psikologis dalam mengatasi ancaman penyakit tersebut. Terakhir, lingkungan sosial dan fisik yang membantu manusia menghadapi pandemi (Taylor, 2019; Agung, 2020). Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi saling mempengaruhi dalam situasi pandemi. Psikologi pandemi telah mengubah psikologis manusia dalam memahami diri dan relasi sosial. Dalam skala yang lebih kecil, proses kognisi sosial mempengaruhi individu dalam merespon suatu kejadian seperti COVID-19. Begitu banyak informasi yang tersedia tentang COVID-19, yang dapat kita akses di berbagai media, menyebabkan potensi bias semakin besar terjadi pada diri individu. Peningkatan jumlah kasus semakin meningkat setiap hari mulai jumlah orang terinfeksi dan jumlah kematian, serta dampak pada sosial, dan ekonomi menjadikan kita cenderung lebih waspada dan khawatir terhadap diri kita. Namun informasi negatif tersebut tidak cukup membuat sebagian besar masyarakat patuh melindungi dirinya, dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, Mengapa? salah satu karena bias kognisi seperti bias optimistik, yaitu kecenderungan menilai dirinya tidak mengalami risiko terkena penyakit dibandingkan orang lain (Brannon, et al., 2018; Agung, 2020).

Kehidupan masyarakat dipenuhi ketidakpastian dari berbagai sudut pandang. Selain itu, pemerintah belum memberikan bantuan yang berarti bagi masyarakat yang terkena dampak. Penanggulangan guna mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan cara menerapkan adaptasi baru kepada masyarakat dan memperketat protokol Kesehatan (Isbaniah et al., 2020; Mukharomah et al., 2021). Pemerintah Provinsi Jawa tengah melakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan cara melakukan komunikasi terhadap masyarakat di berbagai daerah dengan teknik instruktif, informatif dan edukatif (Zahrotunnimah, 2020; Mukharomah et al., 2021). Oleh karena itu, penanggulangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sragen ialah dengan cara menerapkan protokol kesehatan, membatasi diri untuk melakukan kegiatan diluar rumah, menjaga jarak satu meter dari orang lain serta melakukan cuci tangan dengan

menggunakan air mengalir dan sabun (Corona.SragenKab, 2020; Mukharomah et al., 2021).

### **2.11. Prasyarat**

Pada batas-batas tertentu, mungkin benar bahwa kegagalan berbagai program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini disebabkan karena moral hazard atau bad governance dari rezim yang berkuasa. Tetapi, sekadar memperbaiki kualitas transparansi atau kontrol atas pelaksanaan kebijakan pembangunan sesungguhnya bukan jaminan bahwa otomatis kemudian akan terjadi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Upaya untuk memberdayakan kegiatan produktif masyarakat miskin dan meningkatkan posisi bargaining mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan superordinasi, tak pelak prasyarat yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin. Yang dimaksud kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan pasar yang tidak dibayang-bayangi dengan syakwasangka yang seringkali mendiskreditkan masyarakat miskin. Sedangkan yang dimaksud peluang- peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

Ibarat bermain bola, upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin niscaya tidak akan pernah bisa berhasil jika dilakukan secara sepotong- potong, temporer, dan apalagi jika semuanya dilakukan dengan tidak konsisten. Kegiatan pembangunan yang terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis dan dilakukan dengan berbagai prasangka yang keliru, niscaya hanya akan melahirkan kegagalan. Bahkan, tidak mustahil akan menyeret kembali Indonesia untuk terperosok pada situasi krisis gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat dan mematikan.

## **2.12. Metode dan Prosedur Kerja**

Kegiatan ini pada dasarnya bukan hanya bermaksud mengkaji situasi problematik yang dihadapi keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara kontekstual, tetapi juga mencoba merumuskan kebijakan dan rencana aksi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk memperoleh masukan dan data yang akurat, dalam kegiatan ini bahan-bahan yang dibutuhkan telah dikumpulkan melalui beberapa cara, mengkaji dan menganalisis data sekunder terbaru mengenai kondisi kemiskinan dan kondisi demografis penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari BPS, survei-survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Uraian tentang kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan kemiskinan, dinamika dan persebaran penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kedua, melakukan review terhadap hasil-hasil studi mengenai masyarakat miskin dan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan masyarakat miskin yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review terhadap hasil penelitian ini dibatasi hanya pada hasil penelitian terbaru yang relevan. Tujuan dilakukan review terhadap hasil studi tentang kemiskinan ini adalah untuk memperoleh kerangka acuan dan kerangka analisis dalam rangka memahami secara teoritik berbagai faktor penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat.

Ketiga, melakukan survey dan penggalan data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang valid dan akurat mengenai kondisi terbaru dan berbagai tekanan yang dihadapi keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data primer ini, digali dari masyarakat atau tepatnya keluarga- keluarga miskin yang ada di lokasi penelitian. Jumlah keluarga miskin yang menjadi responden.

Keempat, dari 300 keluarga miskin yang diteliti, dalam studi ini kemudian dipilih untuk diwawancarai secara mendalam (*indepth interview*), terutama menyangkut berbagai tekanan kemiskinan yang dialami, dan mekanisme survival yang dikembangkan untuk menyasati perubahan situasi yang menjejaskan mereka. *In-depth interview* dilakukan dengan mendasarkan pada *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan melakukan wawancara secara mendalam ini, bukan saja dapat diperoleh pengalaman

langsung keluarga miskin menyasati keadaan, tetapi juga apa yang mereka butuhkan untuk melangsungkan kehidupan dan mengembangkan usahanya.

## **BAB III METODOLOGI**

### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasi. Begitu pun dengan penelitian ini. Tujuannya terkumpulnya data secara kuantitatif mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun penelitian ini menggunakan metode survey. Menurut Singarimbun dan Effendi (2011), penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode survei ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sesuatu secara keseluruhan dari wilayah atau objek penelitian, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut berlaku umum untuk seluruh wilayah yang menjadi sasaran.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Kajian ini merupakan kajian dengan jenis penelitian survei. Penelitian Survei adalah penelitian dengan memberi suatu batas yang jelas tentang data. Jenis penelitian survei ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui deskripsi kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), penelitian survey dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Dalam penyusunan kajian ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai daerah identifikasi program penanggulangan kemiskinan dalam masa pandemi covid 19.

### 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan Sampel dilakukan dengan Random Sampling. Menurut Sugiyono (2011) teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. selain itu simple random sampling dilakukan dengan metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

Menurut Slovin dalam Amirin (2011), pengambilan sampel menggunakan rumus dari Slovin untuk tingkat kesalahan 6% dan tingkat keyakinan sebesar 94%. Adapun rumus pengambilan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

- n : Besaran sampel
- N : Besaran populasi
- e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan

#### Kalkulator Statistik

##### RUMUS SAMPEL SLOVIN

##### Jumlah Populasi (N) \*

##### Toleransi Error (e) \*

##### Jumlah Sampel (n)

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2018	2019	2020
Kabupaten Ogan Komering Ilir	124,86	124,14	123,34

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 123,340 jiwa pada tahun 2020. Dengan populasi tersebut peneliti menarik jumlah responden sebanyak 275 Responden dan kita bulatkan menjadi 300 responden sebagai pertimbangan kesempurnaan pengambilan data dilapangan.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan instrumen berupa kuisioner. instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Arikunto (2006) menyatakan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai petani karet di Kecamatan Mesuji Makmur. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

### 3.6. Teknik Pengolahan Data

#### a. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisa deskriptif merupakan salah satu jenis data yang dimaksudkan adalah untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau karakteristik dari masing-masing variabel penelitian secara tunggal yang menggunakan analisis distribusi frekuensi, presentase, dan rata-rata (mean), serta standar deviasi.

Beberapa rumus yang digunakan :

#### 1. Rumus Presentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka Presentase

F : Frekuensi Jawaban Responden

N : Jumlah Responden/Sampel

## 2. Rumus Rata-Rata (*mean*)

$$M = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan :

M : Rata-rata

X : Nilai / Harga

N : Jumlah Data

## 3. Perhitungan Interval

Pada perhitungan interval ini menggunakan pendapat menurut Kiswanto<sup>38</sup> :

a) Jumlah Kelas Interval (K)

$$K=1+3,3 (\text{Log } N)$$

b) Rentang Data (R)

$$R= \text{Nilai data tertinggi}-\text{Nilai data terendah}$$

c) Lebar Interval

$$I=R/K$$

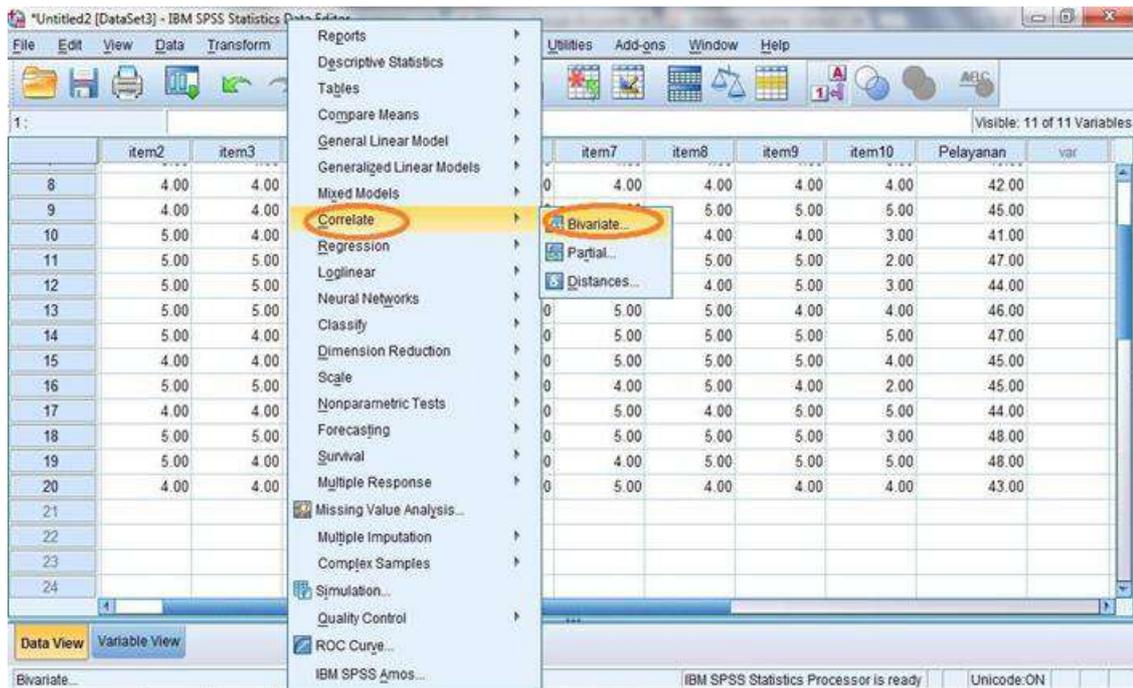
## b. Uji Validitas

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS ini menggunakan Korelasi Product Moment. Validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kuesiner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan untuk sebuah penelitian. Sebelum kita melakukan pengujian, baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana suatu kuesioner bisa dikatakan valid dan reliabel. Penjelasan berikut:

### *Pertama, uji validitas*

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka r hitung dan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item dikatakan tidak valid. R hitung dicari dengan menggunakan program spss, sedangkan r tabel dicari dengan cara melihat tabel r dengan ketentuan r minimal adalah 0,3 (lihat sugiyono, 2011).

Berikut adalah tampilan uji validitas menggunakan SPSS



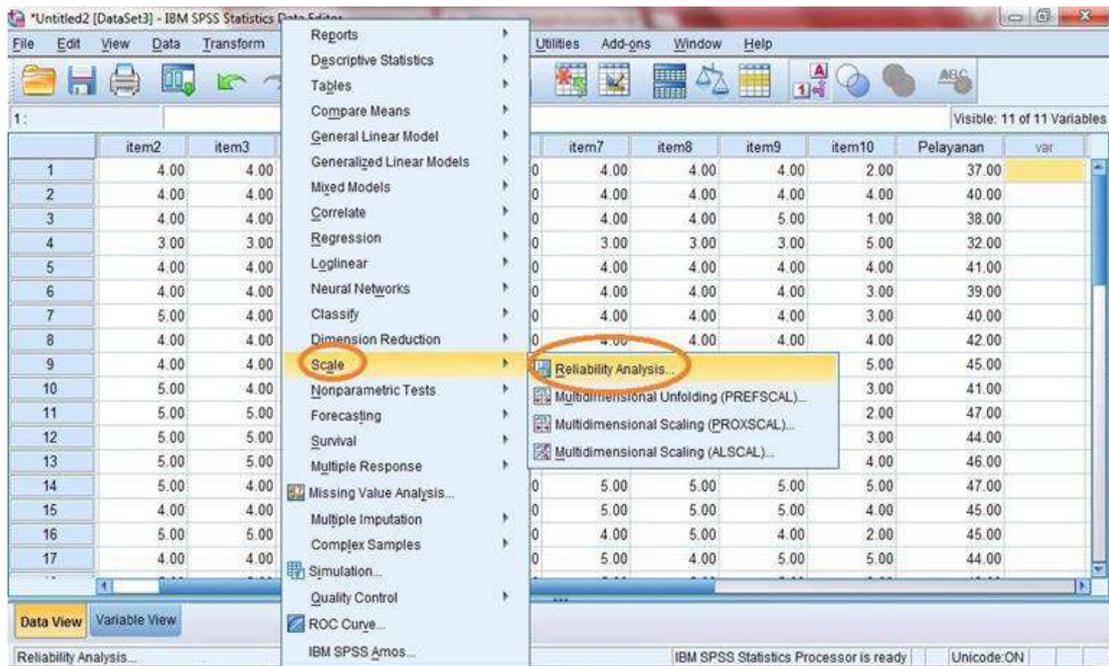
**hasil pengujian Validitas**

		item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10	Pelayanan
item1	Pearson Correlation	1	.616*	.735*	.801*	.390	.437	.269	.632	.348	.097	.703*
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.000	.004	.004	.270	.016	.132	.714	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item2	Pearson Correlation	.616*	1	.740*	.800*	.629*	.349	.330	.629*	.412	-.281	.704*
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000	.003	.131	.150	.003	.071	.386	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item3	Pearson Correlation	.735*	.740*	1	.914*	.446	.366	.446	.617*	.404	-.439	.670*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.049	.113	.049	.004	.078	.063	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item4	Pearson Correlation	.801*	.800*	.914*	1	.630	.436	.367	.693*	.480	-.301	.761*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.016	.056	.112	.001	.032	.197	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item5	Pearson Correlation	.390	.629*	.446	.630	1	.719*	.642	.699*	.479	-.139	.731*
	Sig. (2-tailed)	.064	.003	.049	.016		.000	.014	.001	.032	.888	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
item6	Pearson Correlation	.437	.349	.366	.436	.719*	1	.719*	.719*	.640*	.180	.810*
	Sig. (2-tailed)	.064	.131	.113	.066	.000		.000	.000	.002	.626	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

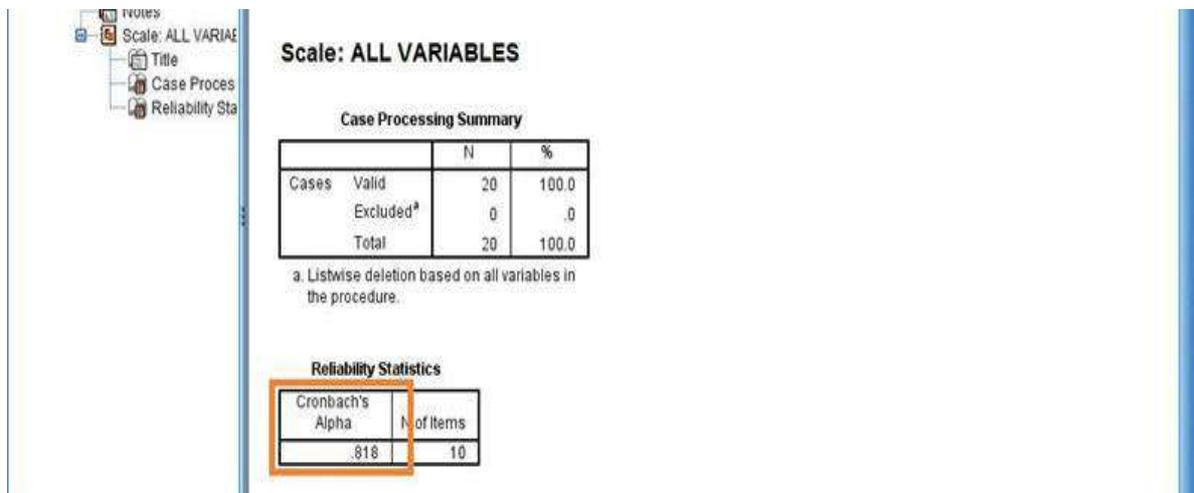
**c. Uji Reliabilitas**

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka cronbach alpha dengan ketentuan nilai cronbach alphan minimal adalah 0,6. Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan spss lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka disimpulkan tidak reliabel.

Gambar Uji Reliabilitas:



Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan spss lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka disimpulkan tidak reliabel.



### 3.7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan perangkat software SPSS. Hasil analisis SPSS akan menampilkan beberapa informasi dari serangkaian hasil uji. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi), distribusi, dan representasi bergambar (grafik).

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan coding sebagai proses penganalisaan. Prosedur pengelolaan data setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Merujuk pada Prasetyo (2006) pengolahan data dilakukan dengan pertama, Pengkodean data (data coding) Pengkodean data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah dari kuisisioner dengan ketentuan yang ada, . kedua, adalah Pembersihan data yaitu memastikan seluruh data sesuai dengan data yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah Tabulating. Tabulating adalah memasukan data kedalam tabel-tabel tertentu dan menghitungnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan memberikan nomor pada responden disetiap kuisisioner yang telah ada, sehingga pengolahan data terlaksana dengan jumlah yang disesuaikan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(2), 68–84.
- Anisa, D. (2020). Korelasi Kemiskinan dan Kejahatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2, 250–255.
- Apriani, D. (2020). Pemkab OKI Segera Alihkan Dana Desa untuk Bantu Tangani Covid-19. Diambil 29 Maret 2021, dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/305449/pemkab-oki-segera-alihkan-dana-desa-untuk-bantu-tangani-covid-19>
- Arikunto, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah, Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 93–100.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1–8.
- Kasna, I. K. (2021). Dampak Pengangguran Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawarti*, 3(2), 58–61.
- kompas.com. (2021). Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 27,55 Juta akibat Covid-19, Tren Penurunan Kemiskinan Terhenti . Diambil 29 Maret 2021, dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/16/073400926/penduduk-miskin-indonesia-naik-jadi-27-55-juta-akibat-covid-19-tren-penurunan?page=all>
- Mukharomah, C. F., Ahmad, M., Pratama, R., & Sari, M. P. (2021). People ' s Knowledge and Behavior on the Covid-19 Virus Pandemic, 19(2).
- Nurwati, R. A. M. dan R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia. *Rahma Ainul Mardiyah R. Nunung Nurwati*.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi

Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.  
<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Qualitative and Quantitative Research Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Thaariq, R. M., Wahyu, M. F. R., Ningrum, D. R., & Aidha, C. N. (2020). PRAKARSA Working Paper No . 01 Kemiskinan Multidimensi dan Risiko COVID-19 di Indonesia. *PRAKARSA*.

Waseso, R. (2020). Akibat Pandemi Covid-19, Pengangguran dan Kemiskinan Diprediksi Mengalami Lonjakan. Diambil 29 Maret 2021, dari  
<https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-pandemi-covid-19-pengangguran-dan-kemiskinan-diprediksi-mengalami-lonjakan>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

